

UJIAN NASIONAL SEBAGAI PANOPTIKON BANGSA

Gianto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Indonesia

giantanto06@gmail.com

Abstract

National Examination is the assessment of learning outcomes by the government which aims to assess the achievement of national competency on specific subjects in the group of subjects in science and technology. The results are used as one of the considerations for mapping the program quality or the educational unit, as the basic selection to the next education level, determining students' graduation, and giving scholarship for improving the quality of education. Panopticon was originally a concept of the prison building designed by English philosopher and social theorist Jeremy Bentham in 1785. The design concept was allowing a guard to watch prisoners everywhere. Later, Panopticon not merely architectural designs, but he became a model of community supervision and discipline, which also applied today. National Exam as State Panoptikon is a philosophical concept where the values in National Examination is examined or analyzed using the concepts and values of Panoptikon

Keywords: National Examination, Panoptikon, State

A. Pendahuluan

Pendidikan bagi umat manusia di dunia termasuk untuk Bangsa Indonesia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu bangsa dapat hidup berkembang untuk maju, sejahtera dan bahagia. Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang harus dikelola secara sistematis dan konsisten. Pendidikan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan setahap demi setahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien akan mempercepat jalannya proses penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut disusunlah kurikulum pendidikan nasional.

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam system pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Istilah kurikulum pertama kali dipakai pada dunia olah raga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata *curir* dan *curere*. Pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai *start* sampai *finish*. Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu terdapat persamaan. Persamaan tersebut adalah, bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai sekarang masih banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.

Dalam konsep kurikulum sebagai mata pelajaran biasanya erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Ijazah sendiri pada dasarnya menggambarkan kemampuan. Artinya, apabila siswa telah berhasil mendapatkan ijazah berarti ia telah menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemampuan tersebut tercermin dalam nilai setiap mata pelajaran yang terkandung dalam ijazah itu. Siswa yang belum memiliki kemampuan atau belum memperoleh nilai berdasarkan standart tertentu tidak akan mendapatkan ijazah, walaupun mungkin saja mereka telah mempelajari kurikulum tersebut. Dengan demikian, dalam pandangan ini kurikulum berorientasi kepada isi atau materi pelajaran (*content oriented*). Proses pembelajaran di sekolah yang menggunakan konsep kurikulum demikian, penguasaan isi pelajaran merupakan sasaran akhir proses pendidikan. Dalam implementasinya pembelajaran akan dipengaruhi oleh isi pembelajaran (keluasan dan kedalaman materi serta jenis materi pembelajaran itu sendiri) dan berbagai instrumen pendukung yang kesemuanya itu tidak akan terlepas dari konteks sosial budaya masyarakat.

Sistem pembelajaran terbentuk oleh tiga subsistem, yaitu subsistem perencanaan pembelajaran, subsistem pelaksanaan pembelajaran dan subsistem evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk mendesain kegiatan pembelajaran sebagai upaya pencapaian tujuan kurikulum. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran dilakukan dalam berbagai tingkat satuan waktu, yang meliputi perencanaan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian, yakni perencanaan untuk satu kali kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan upaya implementasi system kurikulum. Oleh karena itu penyusunan perencanaan harus sesuai dengan tujuan kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran tidak lain merupakan implementasi atau *action* dari perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran erat kaitannya dengan prosedur yang ditempuh guru dan siswa dalam praktik pembelajaran, oleh karena itu, keberhasilan kurikulum sangat tergantung pada pelaksanaan pembelajaran ini. Evaluasi pembelajaran berhubungan dengan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Dalam sistem pembelajaran subsistem evaluasi memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting, oleh sebab hasil evaluasi selain dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan siswa juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan system pendidikan secara nasional. Untuk mengecek atau melihat siswa telah menguasai materi pelajaran atau belum biasanya dilaksanakan tes hasil belajar atau evaluasi.

Dengan demikian evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Kebijakan Ujian Nasional berlaku untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Ujian nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi.

Sangat dirasakan bahwa anak bangsa setiap tahun akan merasakan kekuatiran Ujian Nasional, bukan saja siswa dan guru tetapi juga orang tua dan pengelola sekolah sendiri bahkan kepala dinas pendidikan, walikota atau bupati dan juga mungkin gubernur dari suatu daerah tertentu juga akan merasakan kekhawatiran yang sama dengan guru dan siswa. Kekhawatiran yang dialami siswa sangat wajar karena dapat menentukan masa depan siswa itu sendiri akan lebih baik atau lebih suram. Sementara untuk kepala dinas pendidikan, walikota atau bupati bahkan gubernur sangat terkait dengan gengsi daerah yang dipimpin, apakah termasuk daerah berkategori pandai atau tidak pandai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 66 menyebutkan bahwa Ujian Nasional adalah salah satu bentuk penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil pengamatan peneliti (pelaksanaan ujian nasional yang sudah pernah dilaksanakan), dua minggu menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, semua sekolah mengoptimalkan persiapan. Baik mengintensifkan pendalaman materi hingga doa bersama bahkan ada yang disiarkan dalam TV anak sekolah yang diajak berziarah ke makam wali songo untuk berdo'a. Semua merupakan persiapan lahir-batin yang biasanya tidak hanya dilakukan oleh siswa, namun juga keluarga (orangtua). Terlepas dari plus-minus dan kontroversi, Ujian Nasional tetap dijadikan agenda pendidikan di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka Ujian Nasional harus ditempuh untuk mendapatkan kualifikasi kompetensi lulus SD, SMP dan SMA. Ujian Nasional perlu diadakan dalam rangka untuk mengetahui daya pencapaian target dari standar nasional yang ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah akan mengetahui daerah yang telah mampu atau belum mampu mencapai target, sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan untuk meningkatkan pendidikan daerah tersebut.

Ujian Nasional merupakan pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Ujian Nasional telah menyumbangkan kontribusi dalam rangka menyamakan mutu pendidikan terhadap dunia internasional. Peraturan pelaksanaan Ujian Nasional membuat siswa semakin rajin belajar dan akan memacu kreativitas serta daya berfikir siswa sehingga menjadikan siswa lebih maju. Guru pun semakin giat dan lebih hati-hati dalam mengajar anak didiknya.

Meskipun demikian, kita tetap layak merenungkan apakah Ujian Nasional merupakan kebijakan yang adil? Hal ini mengingat kondisi kegiatan proses belajar mengajar (KBM) masing-masing daerah tidaklah sama. Kondisi letak geografis suatu provinsi di Indonesia, menjadikan sumber perbedaan kultur belajar. Sehingga penyerapan terhadap materi pendidikan pun berbeda, tanpa kita dapat menyalahkan budaya maupun geografis suatu lokasi tempat peserta didik mengikuti sistem dan model pendidikan negeri kita. Hal ini menimbulkan antitesa: Guru di daerah yang mengajar, mengapa dari pusat yang menguji? Kontroversi Ujian Nasional lain yang terus mengganjal adalah akibat sistem penilaian nominal yang sangat kognitif, menimbulkan stigma pandai atau bodoh. Mereka yang lulus dengan nilai tinggi, masuk kategori pandai. Sedang yang tidak lulus, atau memiliki nilai rendah dikategorikan sebagai bodoh. Sementara pandai dan/ atau bodoh, bukanlah menjadi hakikat dasar dari pendidikan. Kontroversi ini muncul dalam kerangka pendidikan berpikir ala Bapak Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang sangat pedagogis versus pendidikan masakini yang telah terjerat dalam sistem global dan cenderung *western* (kebarat-baratan). Jurus jitu yang membuat masyarakat tersihir adalah jargon bahwa Ujian Nasional merupakan salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Hal inilah yang telah menyihir semua elemen pendidikan sehingga konsentrasi kita khusus pada agenda Ujian Nasional. Orangtua tak akan segan menambah budget pendidikan untuk mengikutkan anaknya pada lembaga bimbingan belajar. Lembaga ini konon dipercaya mampu memberi cara-cara pintar, agar meraih nilai Ujian Nasional tinggi. Tentu saja ini menjadi ironi tersendiri bagi dunia pendidikan. Dengan harapan dapat predikat anak pandai. Kemudian mudah diterima di sekolah level atasnya, yang juga memilih calon siswa/mahasiswa dengan nilai tinggi. Sehingga orang tua yang punya modal berbondong-bondong memasukkan

anak-anaknya ikut les dengan biaya yang mahal. Sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu maka dengan sendirinya tidak bisa menambah porsi pendidikan bagi anak-anaknya. Sementara di pihak lain, sekolah juga terpacu menjadikan sekolahnya terbaik, walaupun itu dengan jalan tujuan menghalalkan cara.

Pada abad ke-17 dan 18, disiplin adalah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tubuh yang patuh. Hal ini tidak hanya terjadi di penjara, tetapi juga dalam bidang pendidikan, tempat kerja, militer dan sebagainya. Masyarakat selanjutnya berkembang menurut disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah melibatkan elemen penyiksaan tubuh dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan disiplin amat berhubungan dengan kuasa yang mengontrol. Foucault menguraikan bahwa fenomena disiplin tubuh selalu dikontrol oleh dua instrumen disiplin yang diterapkan dari disiplin militer dalam masyarakat. Pertama, melalui observasi hirarkis atau kemampuan aparatus untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kriteria tunggal. Panoptikon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah bentuk fisik dari instrumen ini. Dengan adanya panoptikon ini kekuasaan sipir menjadi sangat besar sebab para tawanan berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Kehadiran struktur itu sendiri sudah merupakan satu mekanisme kekuasaan dan disiplin yang luar biasa.

Instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral. Dalam hal ini kekurangan disamakan dengan kejahatan. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang dipertontonkan. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa dekatnya manusia dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara sama apabila mereka keluar dari batas-batas yang dipandang waras oleh masyarakat. Dalam keseluruhan penanganan atas penyimpangan-penyimpangan ini, psikiater atau aparat sebenarnya tidak berperan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai kekuasaan yang mengadili.

Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain dioperasikan oleh petugas, dapat dipergunakan oleh banyak individu dengan pelbagai kepentingan. Ia dapat menjadi tempat seorang filsuf yang haus pengetahuan akan manusia menjadi museum manusia. Ia bahkan menjadi tempat bagi mereka yang tergolong mempunyai sedikit penyimpangan seksual memperoleh kenikmatan dengan mengintip orang-orang. Dalam panoptisme inilah Foucault memperlihatkan adanya kekuasaan yang terselubung dalam pelbagai institusi dan lembaga.

Dalam karya klasiknya, *Panopticon; Or The Inspector House* yang terbit tahun 1787, Jeremy Bentham membuat sebuah proposal tentang sebuah model yang bisa dipakai untuk membangun sistem penjara dengan seluruh lingkungannya yang secara total bisa dikontrol. Ide awal konsep Panoptikon ini bermula dari kunjungan Bentham kepada adiknya yang seorang insinyur, Samuel. Dalam mengerjakan reservasi kapal yang sangat besar, Samuel membangun semacam tower yang tinggi di tengah-tengah kapal untuk mengawasi para pekerja. Dari

tower ini, semua pekerja terlihat dengan jelas oleh para pengawas. Pada tahun 1785, Bentham kemudian memulai proyek proposal penjara Panoptikon ini.

Panoptikon, dalam proposal Bentham, merupakan penjara yang dibangun bertingkat dan melingkar. Ditengah-tengah penjara kamar-kamar sel yang mengelilingi tersebut dibangunlah sebuah menara tower. Dari dalam menara tersebut penjaga dapat melihat seluruh gerak-gerik tawanan. Namun, tahanan yang berada di dalam sel tidak pernah bisa melihat penjaga dalam menara. Hal ini dikarenakan cahaya yang masuk dari atap penjara bisa masuk sampai ke seluruh sel tetapi tidak masuk dalam menara. Akibatnya tahanan selalu merasa diawasi oleh penjaga walaupun pengawasan sudah tidak berlangsung. Inilah inti dari konsep penjara Panoptikon, yaitu mekanisme produksi kekuasaan melalui internalisasi pengawasan.

Model yang pada awalnya didesain oleh Bentham tersebut menurut Foucault berfungsi untuk membuat para tahanan dalam penjara menjadi disiplin dan merasa bertanggung-jawab untuk mematuhi aturan dan kelakuannya bisa didisiplinkan sedemikian rupa. Asumsi bahwa dia akan mendapat hukuman jikalau tingkah lakunya selama dalam penjara begitu buruk, maka para tahanan akan bertingkah laku sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena mereka merasa selalu diperhatikan. Diharapkan pola perilaku yang disiplin tersebut akan selalu dibawa hingga pada akhirnya mereka keluar dari penjara dan hidup bebas di masyarakat.

Panoptikon adalah perwujudan puncak dari institusi pendisiplinan modern. Panoptikon merupakan struktur yang memungkinkan aparaturnya melakukan observasi secara menyeluruh (terus menerus) mengenai tawanan, artinya panoptikon memungkinkan penerapan sejenis pandangan tertentu yang berdasarkan “pandangan/ tatapan yang tidak setara” (*unequal gaze*). Dengan panoptikon, aparaturnya (penjaga) bisa mengamati secara konstan dan mengenal dengan cepat. Sehingga, konsep panoptikon dicirikan adanya kuasa atas informasi oleh satu pihak. Di dalam penjara Panoptikon, penguasa seluruh informasi adalah sang penjaga sedangkan tawanan tidak pernah mengetahui informasi. Oleh karena itu, tawanan tidak pernah menjadi subyek komunikasi. Tawanan tidak pernah bisa merasa pasti, apakah ia sedang diawasi atau tidak.

Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasa terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Artinya bangsa adalah suatu komunitas social yang menempati suatu wilayah tertentu yang terikat karena kesamaan bahasa, budaya dan sejarah sehingga menyebabkan rasa kesamaan nasb. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian bangsa adalah orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta pemerintahan sendiri. Kekhususan dari bangsa adalah ditandai oleh cirri-cirinya, yaitu diperoleh secara askriptif atau didapat begitu saja bersama dengan kelahirannya, muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh warga bangsa yang bersangkutan dan diakui oleh bangsa lainnya.¹

¹PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani) (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 10

Ujian Nasional sebagai Panoptikon Bangsa adalah sebuah konsep filosofis dimana nilai-nilai yang ada pada Ujian Nasional ditelaah/ dianalisa menggunakan konsep dan nilai Panoptikon yang pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang terinspirasi oleh Samuel dan dipopulerkan oleh seorang filosof strukturalis kenamaan Perancis Michel Foucault dalam bukunya *Surveiller et punir: Naissance de la Prison* (1975) terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

B. Pembahasan

1. Ujian Nasional

a. Pengertian Ujian Nasional

Penilaian (*assessment*) hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas system penilaiannya. Menurut Djemari Mardapi yang dikutip oleh S. Eko Putro Widoyoko kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil penilaiannya. System penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik.²

Ujian Nasional merupakan suatu penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Guza (2008: 8) mengemukakan bahwa Ujian Nasional pada hakekatnya berbasis hasil (*output-based*) dan hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan standar nasional yang mengacu pada kurikulum nasional pula sehingga Ujian Nasional pada hakikatnya merupakan bentuk ujian berdasarkan patokan (*criterion reference test*). Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153 Tahun 2003 tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Subagiyo, 2008: 248)

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN utama adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi seluruh peserta ujian yang terdaftar sebagai peserta UN tahun pelajaran. UN susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah. Ujian Nasional (UN) merupakan istilah bagi penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biasanya istilah ini digunakan bagi jenjang SLTP dan SMA sederajat, sedangkan bagi peserta didik dalam jenjang SD sederajat digunakan istilah Ujian Akhir sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perlu dipahami oleh semua

² S. Eko Putro Widiyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 29

pihak bahwa Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan atau satuan pendidikan tertentu serta sebagai dasar pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional

Secara umum, tujuan Ujian Nasional ada dua. Pertama untuk menghimpun berbagai keterangan yang dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Adapun secara khusus Ujian Nasional bertujuan untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan dan mencari sekaligus menemukan berbagai factor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat menemukan jalan keluar.³

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Pasal 2, dijelaskan bahwa Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Diadakannya ujian adalah untuk melihat apakah suatu gagasan telah diungkapkan dan difahami dengan jelas, dan apakah metode belajar yang digunakan memang sudah digunakan dengan baik. Dengan adanya ujian, tingkat pemahaman siswa dan ketuntutan pembelajaran dalam jenjang pendidikan dapat diketahui, salah satunya dengan menggunakan Ujian Nasional (UN). Hasil UN digunakan sebagai pertimbangan untuk Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, akreditasi satuan pendidikan dan Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. UN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, bahkan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting. Manfaat dari dilaksanakannya Ujian Nasional adalah untuk (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia no.34 tahun 2007 pasal 3): *pertama* pemetaan mutu satuan dan/ atau program pendidikan. *Kedua* Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. *Ketiga* Penentuan kelulusan peserta didik dari

³Sitiatava Rizema Putra, *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal. 82

program dan/ atau satuan pendidikan. *Keempat* Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.⁴

c. Sejarah Ujian Nasional (UN) di Indonesia

Ujian Nasional atau yang sering disingkat dengan sebutan UN merupakan kebijakan atau usaha pemerintah di dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menciptakan generasi yang unggul dalam semua bidang. Menciptakan siswa yang mempunyai karakter berbasis Pancasila dan UUD 1945. Ujian nasional mulai diberlakukan di Indonesia tahun 1950. Sepanjang proses pelaksanaannya hingga sampai saat ini, perkembangan UN di Indonesia mengalami banyak metamorfosa. Telah beberapa kali diganti formatnya, seperti yang akan dibahas berikut ini:

1. Periode 1950 – 1960an

Pada periode ini, materi ujian dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, Dan Kebudayaan yang mana seluruh soal yang harus dikerjakan adalah dalam bentuk esai. Pada periode ini ujian disebut dengan Ujian Penghabisan. Dan, setelah ujian berakhir, semua soal akan di periksa di pusat rayon.

2. Periode 1965 – 1971

Pada periode ini, pemerintah pusat memegang kendali untuk waktu ujian dan bahan ujian. Seluruh mata pelajaran dimasukkan ke dalam materi ujian, artinya semua mata pelajaran diujikan kepada para siswa. Pada masa itu, disebut dengan Ujian Negara.

3. Periode 1972 – 1979

Pada periode ini, pemerintah sedikit mengendurkan ketatnya peraturan dengan membebaskan setiap sekolah atau sekelompok sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok. Pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.

4. Periode 1980 – 2001

Pada periode ini, kelulusan ditentukan oleh kombinasi nilai dua evaluasi yaitu EBTRANAS dan EBTA yang ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor. Dalam Ebtanas siswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ebtanas adalah enam, meski terdapat satu atau beberapa mata pelajaran bernilai di bawah tiga. Ebtanas dikoordinasi oleh pemerintah pusat, sementara Ebta oleh pemerintah daerah.

5. Periode 2002 – 2004

Pada periode ini Ebtanas diganti dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN) dan standar kelulusan tiap tahun berbeda-beda. Pada UAN 2002 kelulusan ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan adalah 3.01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6.00. Soal ujian dibuat oleh Depdiknas dan pihak sekolah tidak dapat mengatrol nilai UAN. Para siswa yang tidak/belum lulus masih diberi

⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010

kesempatan mengulang selang satu minggu sesudahnya. Pada UAN 2004, kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4.01 dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, akhirnya diadakan ujian ulang.

6. Periode 2005 – 2012

Pada periode ini UAN diganti namanya menjadi Ujian Nasional (UN) dan standar kelulusan setiap tahun pun juga berbeda-beda. Pada UN 2005 minimal nilai untuk setiap mata pelajaran adalah 4.25. Pada UN 2005 ini para siswa yang belum lulus pada tahap I boleh mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus. Pada UN 2006 standar kelulusan minimal adalah 4.25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4.50 dan tidak ada ujian ulang. Pada UN 2007 ini tidak ada ujian ulang. Dan bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengambil paket c untuk meneruskan pendidikan atau mengulang UN tahun depan. Pada UN 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam. Pada UN 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. Pada UN 2010 standar kelulusannya adalah, memiliki nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4.0 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktek kejuruan minimal 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Sementara untuk tahun 2011 dan 2012 Nilai kelulusan siswa masih tetap yaitu 5,5. Begitu juga soal tetap dibagi dalam enam macam paket, yakni lima soal utama dan satu cadangan bila ada soal tak lengkap atau rusak.⁵

2. Panoptikon

Panopticon pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi (*-opticon*) semua (*pan-*) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Karena itu, konsep Panopticon ini menyampaikan apa yang oleh seorang arsitek disebut "sentimen kemahatahuan yang tidak terlihat".

Bentham memperoleh ide Panopticon ini dari rencana pembangunan sekolah militer di Perancis, yang dirancang untuk memudahkan pengawasan. Rancangan awal itu sendiri berasal dari kakak Bentham, Samuel, yang menjadikan Panopticon sebagai solusi bagi rumitnya keterlibatan, dalam upaya menangani sejumlah besar orang. Panopticon oleh Bentham dimaksudkan sebagai model penjara yang lebih murah dibandingkan penjara lain pada masanya, karena hanya membutuhkan sedikit staf.

Pada perkembangannya kemudian, Panopticon bukan lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan

⁵ Didi Apriatna, <http://jagoanbanteng.blogspot.com/2014/05/makalah-analisis-tentang-pelaksanaan.html...>

masyarakat, yang juga diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf yang mengulas masalah pendisiplinan masyarakat dengan model Panopticon ini adalah Michel Foucault.

Desain Panopticon ini disebut oleh Michel Foucault dalam bukunya *Surveiller et punir: Naissance de la Prison* (1975) yang terbit di Perancis, dan lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977).⁶ Desain Panopticon ini menjadi metafora bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi.

a. Panoptikon Bentham

Bangunan panoptikon merupakan bangunan besar, berbentuk melingkar dengan banyak kamar di sepanjang tepi lingkarannya dan di tengah-tengahnya terdapat menara pengawas. Setiap kamar yang terdapat di sepanjang lingkaran tepi bangunan memiliki dua jendela, satu menghadap ke pusat menara yang memungkinkan adanya pemantauan langsung dari menara dan satu lagi berfungsi sebagai penerus cahaya dari sel yang satu ke sel yang lain. Berkebalikan dari konsep penjara bawah tanah yang gelap dan tersembunyi, yang menyembunyikan individu yang dikurungnya, panoptikon justru menggunakan teknik pencahayaan dan menempatkan individu pada posisi yang dapat dilihat setiap saat dari menara pengawas.⁷

Seluruh pemantauan yang mau dicapai melalui bangunan panoptikon didasarkan pada teknik pengaturan cahaya secara geometris. Untuk memantau setiap individu dipakai teknik sinar balik yang berasal dari sel-sel mereka yang mengarah ke bangunan pusat, sehingga dari bayangan yang dibuat oleh sinar tersebut, pengawas dapat memantau individu. Jadi bangunan panoptikon seperti ini dimaksudkan untuk menempatkan pengawas di menara pusat dan orang-orang yang diawasi pada sel di sepanjang keliling bangunan. Melalui mekanisme panoptikon, pengawas dapat terus-menerus memantau individu-individu yang berada dalam sel tanpa pernah dapat dilihat oleh mereka yang diawasi.⁸

Individu-individu penghuni sel-sel panoptikon senantiasa dipantau tanpa pernah dapat mengetahui siapa yang memantau. Mereka menjadi objek informasi dan tidak pernah menjadi subjek komunikasi. Di samping itu, karena setiap individu ditempatkan pada masing-masing sel, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan para pengawas dan dengan demikian segala bentuk penyelewengan dan kekacauan yang mungkin timbul diantara individu-individu dapat dicegah.

Efek utama dari system panoptikon adalah bahwa kuasa berfungsi secara otomatis. Dalam mekanisme panoptikan, individu-individu yang tinggal di setiap sel senantiasa menjadi sadar bahwa dirinya terus-menerus diawasi. Oleh karena itu individu menaruh beban pada dirinya sendiri. Di lain pihak, tidak menjadi masalah siapa yang melaksanakan kuasa, karena toh itu tidak akan mempengaruhi

⁶ Michel Foucault, *Discipline & Punish: The Birth Of The Prison*, Translated by Alan Sheridan (America: Penguin Books, 1995), p. 195

⁷ Michel Foucault, *Didiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, Penyadur: Petrus Sunu Hardiyanta (Yogyakarta: LKIS, 1997), hal. 108

⁸ Michel Foucault, *Didiplin...*

individu sebab mereka tidak melihatnya. Setiap individu, siapa saja dapat duduk di menara pusat, dan tidak menjadi masalah juga mengenai motivasi apa yang mendorongnya untuk melaksanakan kuasa tersebut. Panoptikon memiliki baik prinsip “*visible*”, yakni bahwa individu senantiasa ditaruh dalam pemantauan tetap (permanen) dan “*unverifiable*”, yakni bahwa individu tidak pernah dapat mengetahui kapan saja ia diawasi, kecuali bahwa ia harus yakin bahwa dirinya selalu diawasi.⁹

Panoptikon menjadi mesin yang menjamin “*disimetri*” kuasa, mesin yang mengotomatiskan dan mengindividualisasikan kuasa bukan melalui “pribadi” yang berkuasa (Raja), melainkan melalui penyebaran individu, penyebaran cahaya, pemantauan dan melalui pengaturan yang memiliki mekanisme yang menghasilkan relasi yang menguasai individu. Panoptikon tidak memerlukan pemaksaan fisik untuk membuat orang jahat menjadi baik, orang gila menjadi tenang, pemalas menjadi pekerja keras. Rantai dan gembok yang kuat tidak diperlukan lagi. Panoptikon hanya membutuhkan pengaturan cahaya secara geometris yang memungkinkan pemantauan yang terus-menerus, yang membuat setiap individu sadar bahwa dirinya senantiasa diawasi, ditaklukkan dalam lapangan pemantauan. Oleh karenanya individu mengambil tanggung-jawab bagi dirinya sendiri, memasukkan relasi kuasa tersebut ke dalam dirinya sendiri, dan dengan demikian dia sendiri menjadi penakluk dirinya sendiri. Panoptikon menjadi penaklukan *non-corporal* dengan akibat yang lebih mendalam dan permanen.¹⁰

Panoptikon pada gilirannya menjadi laboratorium yang dapat digunakan sebagai mesin untuk melaksanakan percobaan tingkah laku, melatih dan mengoreksi individu-individu. Panoptikon memungkinkan penerapan hukuman, latihan, koreksi yang berbeda-beda terhadap masing-masing individu, menjadi tempat yang privat bagi percobaan masing-masing individu dan untuk melakukan analisis menyeluruh tentang perubahan individu. Mekanisme pemantauan panoptikon mampu menembus setiap tingkah-laku individu. Panoptikon dengan kurungan melingkar yang tembus pandang dan dengan menara yang tinggi yang penuh kuasa pemantauan telah menjadi proyek suatu lembaga disiplin yang sempurna.¹¹

b. Dominasi yang Bersifat Alamiah

Panoptikon adalah perwujudan puncak dari institusi pendisiplinan modern. Panopticon memungkinkan observasi terus-menerus yang dicirikan oleh sebuah “tatapan yang tidak setara” (*unequal gaze*), sebuah kemungkinan observasi yang terus-menerus. Mungkin gambaran yang paling penting dari Panoptikon adalah bahwa pengaturan itu secara spesifik dirancang sedemikian rupa, sehingga tahanan tidak pernah bisa merasa pasti, apakah ia sedang diawasi atau tidak. Panoptikon menjadi mekanisme untuk membentuk “tubuh yang patuh”. Melalui serangkaian pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian terhadap narapidana, system penjara akan menentukan karakteristik dan kualitas diri

⁹ Michel Foucault, *Didiplin...*

¹⁰ Michel Foucault, *Didiplin...*, hal. 110

¹¹ Michel Foucault, *Didiplin...*, hal. 114

narapidana. Selain menjadi sarana pendisiplinan, penjara menjadi sarana untuk menggembleng narapidana agar memiliki serangkaian karakter “ideal” yang dituntut masyarakat. Penjara juga menjadi system ujian bagi para narapidana. Kinerja dan perilaku mereka selama di penjara menjadi tolak-ukur atau bahan penilaian bagi “nasib” mereka selanjutnya.¹² Melalui mekanisme pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian ini menyebabkan internalisasi individualitas pendisiplinan dan kebutuhan tubuh-tubuh yang mudah diatur itu akan adanya teman setahanan. Ini berarti seseorang kecil kemungkinan melanggar peraturan atau hukum jika mereka yakin sedang diawasi, bahkan sekalipun mereka sebenarnya sedang tidak diawasi.

Jadi, penjara, dan khususnya penjara yang mengikuti model Panoptikon, menyediakan bentuk ideal penghukuman modern. Foucault menganggap, inilah sebabnya mengapa hukuman “lembut” bersifat umum, yang berupa kelompok-kelompok kerja untuk publik, kalah oleh penjara. Ini adalah modernisasi penghukuman yang ideal, karena dominasinya pada akhirnya bersifat alamiah.

Di sini Foucault menantang ide yang secara umum diterima, bahwa penjara menjadi bentuk penghukuman yang konsisten berkat keprihatinan kemanusiaan dari kaum reformis, walaupun Foucault tidak membantah hal itu. Foucault melakukan hal ini dengan melacak secara cermat pergeseran-pergeseran dalam budaya, yang menjurus ke dominasi penjara, dengan memfokuskan pada tubuh dan pertanyaan-pertanyaan tentang kuasa.

Penjara adalah bentuk yang digunakan oleh “disiplin-disiplin” sebuah kekuatan teknologis baru, yang juga bisa ditemukan –menurut Foucault—pada sekolah, rumah sakit, barak militer, dan sebagainya.

Dalam menguji konstruksi penjara sebagai sarana sentral penghukuman kriminal, Foucault membangun kasus bagi gagasan bahwa penjara menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang telah menjadi sebuah lembaga berdaulat yang mencakup semuanya.

Penjara adalah satu bagian dari jejaring yang sangat besar, yang mencakup sekolah, lembaga militer, rumah sakit, dan pabrik-pabrik, yang membangun sebuah masyarakat Panoptik bagi anggota-anggotanya. Sistem ini menciptakan karir-karir pendisiplinan bagi mereka yang terkurung dalam koridor-koridornya. Sistem ini beroperasi di bawah otoritas ilmiah kedokteran, psikologi, dan kriminologi.

Sistem ini juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang memastikan bahwa ia tidak boleh gagal menghasilkan penjahat-penjahat. Kejahatan itu diproduksi ketika kriminalitas sosial kecil-kecilan tak lagi bisa ditoleransi, dan menciptakan sebuah kelas “pelaku pelanggaran” yang terspesialisasi, yang bertindak sebagai proksi (kepanjangan tangan) polisi dalam mengawasi masyarakat.

3. Bangsa Indonesia.

Bangsa adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan, ras, bahasa, agama dan adat-istiadat. Persekutuan hidup artinya perkumpulan orang-orang yang saling

¹² Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 98

membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam satu wilayah tertentu. Dalam arti inilah muncul paham nasionalisme atau semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang menempati kepulauan nusantara, memiliki kesamaan watak, cita-cita moral dan cita-cita hukum yang terikat menjadi satu karena keinginan dan pengalaman sejarah.

Cir-ciri bangsa antara lain: a) sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan (*self belonging together*), b) memiliki wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri, c) ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri, d) keanggotaan orangnya bersifat kebangsaan/ nasionalis, e) tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya, f) dapat terjadi karena adanya kesamaan dalam identitas budaya, agama, bahasa sehingga dapat membedakan dengan bangsa lainnya.

Unsur-unsur pembentuk bangsa menurut *Friederch Hertz* antara lain:a) adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara social, ekonomi, politik, budaya dan komunikasi urusan dalam negeri, b) adanya keinginan dalam menunjukkan karakteristik sendiri melalui kemandirian, keaslian, kelebihan, bahasa dan lain-lain, c) adanya hasrat dalam menunjukkan keunggulan dari dalam kerja sama antarbangsa.¹³

4. Ujian Nasional Sebagai Panoptikon Bangsa

Ujian Nasional merupakan suatu penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak, ini sesuai dengan konsep panoptikon bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengetahui atau pemantauan langsung sebuah kejadian yang dilaksanakan sebuah system , perbedaannya hanya pada lokasi jika ujian nasional dilaksanakan di sekolah yang meliputi seluruh kepulauan nusantara yang bernama Indonesia sementara panoptikon dilaksanakan di penjara. Selain itu tujuan ujian nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau mengukur sekaligus alat pengendali mutu pendidikan peserta didik secara nasional bahkan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini sangat sesuai dengan konsep panoptikon. Bahwa panoptikon atau dalam kasus ini ujian nasional adalah perwujudan puncak dari istitusi pendisiplinan modern. Panoptikon atau ujian nasional memungkinkan observasi terus-menerus yang dicirikan oleh sebuah “tatapan yang tidak setara” kepada peserta didik. Melalui serangkaian pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian terhadap peserta didik, system ujian nasional akan menentukan karakteristik dan kualitas diri peserta didik. Selain menjadi sarana pendisiplinan, ujian nasional juga menjadi sarana penggembleng peserta didik agar memiliki serangkaian karakter “ideal” yang dituntut masyarakat.

Efek utama dari system ujian nasional dilihat dari sudut pandang panoptikon adalah bahwa kuasa berfungsi secara otomatis. Dalam mekanisme ujian nasional, peserta didik yang tinggal di sekolah senantiasa menjadi sadar bahwa dirinya terus-menerus diawasi. Oleh karena itu peserta didik menaruh

¹³<http://www.artikelsiana.com/2015/05/pengertian-bangsa-unsur-terbentuk-negara.html>, diakses: Jumat, 20 Mei 2016, Waktu: 16.21 Wita

beban pada dirinya sendiri. Ujian nasional tidak memerlukan paksaan fisik untuk membuat orang pemalas menjadi pekerja keras. Rajam dan cambuk yang kuat tidak diperlukan lagi. Ujian nasional hanya memerlukan sosialisasi yang masif dengan dukungan media hingga membuat peserta didik sadar bahwa dirinya senantiasa diawasi, ditaklukkan dalam lapangan pemantauan. Ujian nasional pada gilirannya menjadi laboratorium yang dapat digunakan sebagai mesin untuk melaksanakan percobaan tingkah-laku, melatih dan mengoreksi individu-individu. Ujian nasional memungkinkan penghukuman, latihan, koreksi yang berbeda-beda terhadap masing-masing individu, menjadi tempat yang privat bagi percobaan masing-masing individu dan untuk melakukan analisis menyeluruh tentang perubahan individu.

Kinerja dan perilaku mereka selama mengikuti ujian nasional menjadi tolak-ukur atau bahan penilaian bagi “nasib” mereka selanjutnya. Melalui mekanisme pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian ini menyebabkan internalisasi individualitas pendisiplinan dan kebutuhan tubuh-tubuh yang mudah diatur. Ini berarti seseorang kecil kemungkinan melanggar peraturan atau hukum jika mereka sedang diawasi, bahkan sekalipun mereka sebenarnya sedang tidak diawasi. Ujian nasional bisa disebut sebagai modernisasi penghukuman yang ideal, karena dominasinya pada akhirnya bersifat alamiah, bahwa ia menjadi bagian dari system yang lebih besar, yang telah menjadi sebuah lembaga berdaulat yang mencakup semuanya. System ini menciptakan karir-karir pendisiplinan bagi mereka yang terkurung dalam koridor-koridornya. System ini beroperasi di bawah otoritas ilmiah kedokteran, psikologi dan kriminologi. Selain itu ujian nasional

C. Kesimpulan

Ujian nasional sebagai solusi bagi rumitnya keterlibatan, dalam upaya menangani sejumlah besar orang berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional yaitu sekelompok manusia yang menempati kepulauan nusantara mulai dari sabang sampai merauke yang bernama bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan betapa rumitnya dan susahny mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengamatan dalam system pendidikan di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil berbagai suku, adat-istiadat dan kebiasaan jika tidak ada system ujian nasional. Inilah signifikansi ujian nasional sebagai mekanisme pendisiplinan modern yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan individu yang berkarakter yang ideal sesuai kebutuhan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Fathur Rohman, *Kecurangan Dalam Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas*, Tesis, Jember: Universitas Jember, 2013
- Didi Apriatna, <http://jagoanbanten.blogspot.com/2014/05/makalah-analisis-tentang-pelaksanaan.html>
- Muhammad Ilham, *Panoptik: Sejarah dan Kuasa Seks*. Alamat: <http://ilhamfadli.blogspot.com/2009/03/panoptik-sejarah-dan-kuasa-seks.html>
- Tharrasita Carissa, *Penjara Sebagai Institusi Koreksi: Kegagalan Penjara Ditinjau Dari Lingkungan Fisik dan Mental*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Michel Foucault, *Discipline & Punish: The Birth Of The Prison*, Translated by Alan Sheridan, America: Penguin Books, 1995
- Michel Foucault, *Didiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, Penyadur: Petrus Sunu Hardiyanta, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Joni Yulianto, *Pendidikan Inklusi: Antara Konsep, dan Praktek*, Yogyakarta: Artikel yang disajikan di Aula PP Muhammadiyah, 29 Juni 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Imam Prayogo, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2003
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010
- Sitiatava Rizema Putra, *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013
- S. Eko Putro Widiyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013